

Nama : Adriligha Roma S

Npm : 2256041049

Kelas : Man B

ANALISIS E-GOVERNMENT TERHADAP EFISIENSI BIROKRASI

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul yang peneliti ambil yaitu, “ Analisi E-Government Terhadap Efisiensi Birokrasi” E-government memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Ini melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, serta memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, tujuan dari implementasi e-government adalah untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap tindakan pemerintah.

E-government adalah sebuah kerangka kerja teknologi informasi yang diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian opsi kepada warga untuk lebih mudah mengakses informasi publik. Untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan peningkatan efektivitas serta efisiensi dalam pelayanan publik, sangat penting adanya perumusan kebijakan dan strategi pengembangan e-government (Wirawan, 2020).

Di samping itu, birokrasi seringkali mengalami tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan, dan memiliki reputasi yang tidak baik, terutama dalam konteks pelayanan publik sehari-hari, terutama di negara-negara berkembang yang mewarisi tradisi birokrasi yang cenderung korup dan tidak mendukung masyarakat yang seharusnya mereka layani. Meskipun begitu, kemajuan dalam birokrasi Indonesia memang sudah mulai melupakan penyakit patrimonialismenya. Namun, perkembangannya belum memenuhi ekspektasi. Kepelikan dalam dunia demokrasi dan penerapan desentralisasi yang tidak efisien, secara signifikan telah berdampak pada kondisi birokrasi Indonesia saat ini. Birokrasi di Indonesia perlu mengalami perbaikan menyeluruh di semua sektor pemerintahan agar dapat meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi harus

mampu memenuhi kebutuhan dan harapan publik itu sendiri, dan hal ini sangat terkait dengan konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

2.2 E-Government Dalam Birokrasi

2.2.1 penerapam E-Government Dalam Birokrasi Di Indonesia

Pemerintah telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau electronic government (e-government) sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif. Untuk mewujudkan tata kelola lebih baik, pemerintah melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) merumuskan payung hukum dalam penerapan e-government di Indonesia.

E-Government, atau pemerintahan elektronik, adalah konsep yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat. Di Indonesia, implementasi E-Government telah menjadi fokus dalam reformasi birokrasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Terdapat beberapa aspek E-Government dalam birokrasi Indonesia:

1. **Portal Pemerintah:** Pemerintah Indonesia telah mengembangkan portal resmi yang memberikan akses ke berbagai layanan dan informasi pemerintah, seperti portal www.indonesia.go.id. Ini memungkinkan warga negara untuk mengakses informasi pemerintah dan layanan secara online.
2. **Pelayanan Publik Online:** Banyak instansi pemerintah di Indonesia telah mengembangkan sistem pelayanan online, termasuk pembuatan paspor, perpanjangan SIM, dan pendaftaran pajak. Hal ini memudahkan warga untuk mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah.
3. **Sistem Informasi Manajemen Birokrasi:** Pemerintah telah mengembangkan sistem informasi untuk mendukung manajemen birokrasi, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur.
4. **Pengawasan dan Evaluasi Kinerja:** E-Government juga digunakan untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah, termasuk melalui pengukuran kepuasan masyarakat terhadap layanan-layanan yang disediakan.
5. **E-Procurement:** Pemerintah Indonesia telah mengadopsi E-Procurement untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini meningkatkan transparansi dan meminimalkan praktik korupsi.

2.2.2 indikator pengembangan E-Government

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government (Indrajit, 2004), untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah:

1) Support Elemen support adalah elemen paling penting dalam pengembangan e-government perlu dukungan atau yang disebut political will dari pejabat publik. Hal ini agar konsep e-government dapat diterapkan, tanpa adanya itu berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government dapat terlaksana.

2) Capacity Elemen capacity merupakan sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan e-government agar konsep yang telah diciptakan dapat menjadi kenyataan. Terdapat tiga sumber daya yang harus dimiliki, yaitu:

a) Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-government. b) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan e-government. c) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan

3) Value Elemen value berdasarkan pada manfaat yang didapat oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat sebagai penerima pelayanan e-government. Dalam elemen value yang menentukan besar tidaknya manfaat e-government adalah masyarakat sebagai penerima pelayanan.

2.3 Birokrasi

Birokrasi merujuk pada struktur organisasi dan proses administratif yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi lain untuk mengelola sumber daya, menerapkan kebijakan, dan menyediakan layanan. Ini adalah elemen penting dalam berbagai lembaga dan entitas di seluruh dunia, termasuk pemerintah, bisnis, organisasi nirlaba, dan sektor publik lainnya.

Terdapat beberapa karakteristik terkait birokrasi:

1. **Hierarki:** Birokrasi umumnya melibatkan struktur hierarkis dengan tingkatan yang berbeda, dimana setiap tingkatan memiliki tanggung jawab tertentu. Ini

memungkinkan pembagian kerja yang efisien dan pengambilan keputusan yang terkoordinasi.

2. **Spesialisasi:** Dalam birokrasi, pekerjaan dibagi menjadi tugas-tugas yang spesifik dan berorientasi pada fungsi. Setiap individu atau unit bertanggung jawab atas tugas tertentu, yang memungkinkan mereka untuk menjadi ahli di bidangnya.
3. **Standarisasi:** Birokrasi melibatkan pembuatan aturan, prosedur, dan pedoman standar untuk mengatur tindakan dan keputusan. Standarisasi ini dapat membantu dalam menjaga konsistensi dan efisiensi.
4. **Impersonalitas:** Birokrasi cenderung bersifat impersonal, artinya keputusan dan interaksi dianggap berdasarkan peraturan dan prosedur daripada hubungan pribadi atau preferensi individu.
5. **Efisiensi:** Salah satu tujuan utama birokrasi adalah mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan pelaksanaan tugas. Ini bisa dicapai melalui standarisasi, spesialisasi, dan pemantauan kinerja.

2.4 Penataan Ulang System Birokrasi

Ada banyak penjelasan yang bisa digunakan untuk memahami mengapa pemerintah dan birokrasi gagal mengembangkan kinerja pelayanan yang baik. Kemampuan dari suatu sistem pelayanan publik dalam merespon dinamika yang terjadi dalam masyarakatnya secara tepat dan cepat serta efisien akan sangat ditentukan oleh bagaimana misi birokrasi dapat dipahami dan dijadikan sebagai basis kriteria dalam pengambilan kebijakan oleh birokrasi itu. Ketidakjelasan misi juga membuat orientasi birokrasi dan pejabatnya pada prosedur dan peraturan menjadi amat tinggi. Apalagi dalam birokrasi publik Indonesia yang cenderung menjadikan prosedur dan peraturan sebagai panglima. Akibatnya ketidakjelasan misi birokrasi publik mendorong para pejabat birokrasi publik menggunakan prosedur dan aturan sebagai kriteria utama dalam penyelenggaraan pelayanan. Akibatnya para pegawai takut berbuat salah dan cenderung menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), walaupun keadaan yang ditemui dalam kenyataan sangat jauh berbeda dengan peraturan-peraturan teknis tersebut⁷. Kecenderungan penelitian sejak lama telah menunjukkan bahwa untuk merujuk pada prosedur dan kurangnya kreativitas merupakan ciri umum para pegawai negeri sipil di Indonesia.

2.5 Konsep Dasar Birokrasi

Untuk memahami analisis e-Government dalam efisiensi birokrasi, penting untuk memahami konsep dasar e-Government. E-Government merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah dalam penyediaan layanan publik dan interaksi dengan masyarakat. Konsep ini melibatkan penggunaan infrastruktur teknologi, aplikasi, kebijakan, dan keamanan data untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.

2.5.1 Definisi E-Government

E-Government dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi publik, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Melalui e-Government, pemerintah dapat menyediakan layanan publik secara elektronik, mengelola data dan informasi secara efisien, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat.

2.5.2 Model E-Government

E-Government dapat dibagi menjadi beberapa model, termasuk Government-to-Citizen (G2C), Government-to-Business (G2B), dan Government-to-Government (G2G). Model G2C melibatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan layanan publik secara langsung. Contohnya adalah pendaftaran penduduk, pembayaran pajak, dan pengajuan permohonan izin. Model G2B melibatkan interaksi antara pemerintah dan sektor bisnis dalam memberikan layanan terkait bisnis dan regulasi. Contohnya adalah pengajuan perizinan usaha dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Model G2G melibatkan interaksi antara lembaga pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kerjasama administratif. Contohnya adalah pertukaran data antara departemen pemerintah, kolaborasi dalam pengambilan keputusan, dan koordinasi kebijakan.

2.6 Manfaat E-Government Dalam Efisiensi Birokrasi

Penerapan e-Government dapat memberikan berbagai manfaat dalam meningkatkan efisiensi birokrasi. Beberapa manfaat tersebut antara lain:

A. Otomatisasi proses administrasi

E-Government memungkinkan otomatisasi proses administrasi dan pengolahan data yang sebelumnya dilakukan secara manual. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual yang lambat dan rentan terhadap kesalahan. Dengan adanya sistem elektronik, proses administrasi dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan akurat.

Misalnya, penggunaan sistem basis data terintegrasi memungkinkan berbagi data antarinstansi pemerintah, sehingga menghindari duplikasi data dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

B. Aksesibilitas informasi

E-Government meningkatkan aksesibilitas informasi publik dengan menyediakan platform elektronik yang memudahkan warga dalam mendapatkan informasi pemerintahan dan layanan publik. Melalui portal e-Government, warga dapat mengakses informasi mengenai kebijakan pemerintah, prosedur layanan publik, dan data publik secara mudah dan transparan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa harus menghadiri kantor pemerintah secara fisik.

C. Pengurangan birokrasi

Penerapan e-Government dapat mengurangi tingkat birokrasi dengan mempercepat proses pengambilan keputusan dan mengurangi jumlah dokumen fisik yang harus diproses secara manual. Dengan adanya sistem elektronik, proses pengajuan permohonan, pengolahan dokumen, dan evaluasi dapat dilakukan secara efisien dan terotomatisasi. Hal ini dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses administrasi dan mengurangi biaya yang terkait dengan birokrasi yang berlebihan.

D. Partisipasi publik yang lebih besar

E-Government memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Melalui platform e-Government, warga dapat memberikan masukan, saran, atau keluhan terkait kebijakan pemerintah atau layanan publik. Partisipasi publik yang lebih besar ini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.7 Tantangan Dalam Implementasi E-Government

Meskipun e-Government menawarkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi birokrasi, implementasinya juga menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa tantangan yang perlu diperhatikan adalah:

A. Keterbatasan akses dan infrastruktur teknologi

Implementasi e-Government membutuhkan akses yang luas terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Namun, keterbatasan akses internet dan infrastruktur teknologi yang memadai masih menjadi masalah di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan atau di negara-negara berkembang. Keterbatasan ini dapat membatasi partisipasi masyarakat dalam layanan e-Government dan mempengaruhi efektivitas implementasi.

B. Keamanan dan privasi data

Penerapan e-Government juga menghadapi tantangan terkait keamanan dan privasi data. Dalam menyimpan dan mengelola data elektronik, pemerintah harus memastikan keamanan data yang sensitif dan privasi warga. Ancaman keamanan seperti peretasan atau penyalahgunaan data dapat menjadi hambatan serius dalam implementasi e-Government yang efektif.

C. Perubahan budaya dan resistensi

Implementasi e-Government juga memerlukan perubahan budaya di kalangan birokrasi dan masyarakat. Penerapan teknologi baru dan perubahan proses kerja dapat menghadapi resistensi dari pihak yang terbiasa dengan cara kerja tradisional. Dibutuhkan upaya komunikasi dan pelatihan yang efektif untuk memastikan adopsi yang sukses dan dukungan dari semua pihak terkait.

2.8 Landasan Teori

IV. Landasan Teori

A. Konsep e-Government

- **Definisi e-Government:** E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik. Melalui e-Government, pemerintah dapat mempercepat proses administrasi, meningkatkan partisipasi publik, dan meningkatkan efisiensi birokrasi.
- **Model e-Government:** Ada beberapa model e-Government, seperti Government-to-Citizen (G2C), Government-to-Business (G2B), dan Government-to-Government (G2G). Model G2C melibatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, G2B melibatkan interaksi dengan sektor bisnis, dan G2G melibatkan interaksi antara lembaga pemerintah.

B. Efisiensi Birokrasi

- Definisi efisiensi birokrasi: Efisiensi birokrasi merujuk pada kemampuan suatu sistem birokrasi untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Efisiensi dapat diukur dari segi waktu, biaya, dan kualitas hasil kerja.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi birokrasi: Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi birokrasi antara lain struktur organisasi yang efektif, proses kerja yang terstandarisasi, kompetensi pegawai, penggunaan teknologi yang tepat, dan adanya mekanisme pengukuran kinerja.

C. Hubungan antara e-Government dan Efisiensi Birokrasi

- E-Government sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi birokrasi: Implementasi e-Government dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan aksesibilitas informasi. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan publik, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat pengambilan keputusan.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas e-Government dalam meningkatkan efisiensi birokrasi: Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas e-Government dalam meningkatkan efisiensi birokrasi adalah ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, keterampilan pegawai dalam menggunakan teknologi, dukungan kebijakan yang kuat, keamanan data yang terjamin, dan partisipasi aktif dari masyarakat

2.9 Kerangka Pikir

- Identifikasi masalah: Efisiensi birokrasi masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di banyak negara. Proses administrasi yang lambat, birokrasi yang berlebihan, dan kurangnya aksesibilitas informasi dapat menghambat efisiensi birokrasi.
- Tujuan penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi e-Government dalam meningkatkan efisiensi birokrasi. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas e-Government

dalam meningkatkan efisiensi birokrasi serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi e-Government.

- Variabel penelitian:

Variabel independen: Implementasi e-Government (termasuk kebijakan, infrastruktur teknologi, keterampilan pegawai, dan keamanan data). Variabel dependen: Efisiensi birokrasi (termasuk waktu proses administrasi, biaya, dan kualitas pelayanan publik).

Kerangka konseptual: Kerangka konseptual penelitian ini akan menggambarkan hubungan antara implementasi e-Government dan efisiensi birokrasi. Kerangka ini akan memperlihatkan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas e-Government dapat meningkatkan efisiensi birokrasi melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 25-37.

Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. Journal of Governance and Social Policy, 1(1), 24-34

Taufik, T., & Warsono, H. (2020). Birokrasi baru untuk new normal: tinjauan model perubahan birokrasi dalam pelayanan publik di era Covid-19. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(1), 1-18.

riawan, H., & Rijal, R. (2019). REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus UPTB Samsat Kabupaten Biak Numfor). Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 5(2), 128-141.